

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGURANGAN PENGUNAAN KANTONG PLASTIK DI KOTA BANJARMASIN KELURAHAN TELAWANG

Permata Rahman Razak, M.Uhaib As'ad, A.Nikhrawi Hamdie

Ilmu administrasi publik, 63201, Fisip, Universitas Islam Kalimantan, 16120271

Ilmu administrasi publik, 63201, Fisip, Universitas Islam Kalimantan, 1106036001

Ilmu administrasi publik, 63201, Fisip, Universitas Islam Kalimantan, 1105026401

E-mail : 11zakbanjarmasin@gmail.com

ABSTRAK

Permata Rahman Razak, NPM 16120271 *“Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Banjarmasin Kelurahan Telawang”*. Bimbingan Bapak Uhaib As'ad sebagai pembimbing utama dan Bapak A. Nikhrawi Hamdie sebagai Co pembimbing.

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan peraturan walikota nomor 18 tahun 2016 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik, serta mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung dalam implementasi kebijakan peraturan walikota nomor 18 tahun 2016 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di kota Banjarmasin Kelurahan Telawang

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan dengan cara dokumentasi dan wawancara kepada informan, dan narasumber. Sampel ditentukan dengan teknik sampling purposive. Analisis data menggunakan reduksi data, interpretasi data, dan melakukan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan peraturan walikota nomor 18 tahun 2016 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di kota Banjarmasin Kelurahan Telawang, sudah berjalan dengan baik sesuai standar operasional prosedur, dengan berjalan dengan baik namun masih terdapat beberapa faktor penghambat dalam kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik yang harus di perbaiki dalam kedepannya.

Kata kunci : Implementasi kebijakan kantong plastik, pengurangan penggunaan kantong plastik

ABSTRACT

Permata Rahman Razak, NPM 16120271 "Implementation of Mayor Regulation No. 18/2016 on Reducing the Use of Plastic Bags in Banjarmasin City, Telawang Village". Guidance by Mr. Uhaib As'ad as the main mentor and Mr. A. Nikhrawi Hamdie as Co mentor.

The purpose of the research is to find out the description of the implementation of the mayoral regulation policy number 18 of 2016 concerning reducing the use of plastic bags, as well as knowing the inhibiting factors and supporting factors in implementing the policy of the mayor regulation number 18 of 2016 concerning reducing the use of plastic bags in the city of Banjarmasin Kelurahan Telawang

The research method used a qualitative approach with descriptive research type. Data were collected by means of documentation and interviews with informants and sources. The sample was determined by purposive sampling technique. Data analysis uses data reduction, data interpretation, and draws conclusions.

The results of the study indicate that the implementation of the mayoral regulation policy number 18 of 2016 concerning reducing the use of plastic bags in the city of Banjarmasin, Telawang Urban Village, has been going well according to standard operating procedures, is running well but there are still some inhibiting factors in the policy of reducing the use of plastic bags that are must be fixed in the future.

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat di era globalisasi memiliki banyak perubahan baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya, sosial dan ekologi. Perubahan itu sendiri mempunyai perubahan positif dan negatif. Diantaranya dampak positif yaitu berkembangnya turisme dan pariwisata, Kemajuan teknologi menimbulkan kehidupan social ekonomi lebih produktif, efektif, dan efisien dalam pembuatan mampu beroperasi di pasaran internasional, sedangkan dalam dampak negatif sendiri yaitu semakin hilangnya rasa solidaritas, kepedulian kepada sesama dalam keadaan tertentu, misalkan : sakit, kecelakaan, musibah hanya menjadi tanggung jawab per orang, sehingga terjadi kerusakan lingkungan dan polusi limbah industry. Dimana pelaku-pelaku industry membuang limbahnya di aliran sungai dan menebang pohon sembarangan tanpa melakukan reboisasi kembali.

Berbagai macam barang atau produk berbahan plastik digunakan dalam keseharian manusia. Bahan plastic sangat disukai karena memiliki sifat praktis, ringan dan kedap air, hal ini sesuai dengan kehidupan manusia mobilitas tinggi. Salah satu produk berbahan plastic yang kerap digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah kantong plastic belanja sekali pakai. Masyarakat kerap menggunakan kantong plastik sekali pakai dengan tidak bijak . Contohnya ketika konsumen membeli pisang, minuman soda dan sabun cuci piring maka petugas kasir toko akan menggunakan minimal 3 kantong plastik yaitu 1 kantong plastik untuk pisang, 1 kantong untuk minuman sida dan 1 kantong plastik untuk sabun cuci piring. Selanjutnya kantong plastik sekali pakai akan menjadi sampah yang membutuhkan waktu 29 sampai 1000 tahun akhirnya dapat diurai.

Terutama kantong plastik di Indonesia sendiri memiliki masalah serius dengan sampah kantong plastik. Setiap tahun di Indonesia, rata-rata dalam penggunaan kantong plastik setiap orang adalah 700 lembar, sehingga 100 miliar kantong plastik terkonsumsi setiap tahunnya. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk pemerintah kota Banjarmasin , telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan. Pemerintah kota Banjarmasin telah membentuk Peraturan Walikota No. 18 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Banjarmasin.

Hal ini dikarenakan plastik merupakan bahan pembungkus atau wadah yang praktis digunakan dan terlihat bersih, harganya pun murah, tetapi dibalik itu, banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahaya dari kantong plastik, dan cara penanganan yang benar.

Pada hakekatnya penggunaan dan pengurangan kantong plastik dapat dilakukan dengan 3 cara yang lebih ramah lingkungan terkait dengan mengelola sampah kantong plastik adalah : 1) dengan melakukan pemakaian berulang kali barang-barang terbuat dari plastik, 2) mengurangi perbelanjaan atau penggunaan barang yang bahan utamanya terbuat dari plastik, 3) mendaur ulang barang-barang yang terbuat dari plastik. Dengan dilakukannya 3 cara tersebut secara tidak langsung dapat mengurangi sampah kantong plastik.

Pemakaian kantong plastik yang berlebihan menjadikan permasalahan terhadap lingkungan Kota Banjarmasin karena kantong sampah plastik yang dihasilkan seluruh pengguna kantong plastik

menjadi salah satu fakto penyebab , dan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan itu baru dapat diuraikan setelah kurun waktu lebih dari ratusan tahun bahkan ribuan tahun hal ini membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga untuk menjadikannya kantong plastik yang dapat diuraikan.

Selain itu, kantong plastik mengandung racun karsinogenik yang jika terkena cuaca terus-menerus dan terkena api atau terbakar akan berdampak pada kesehatan makhluk hidup. Sampah kantong plastik juga dapat mengakibatkan masalah yang kompleks seperti, meluapnya sungai-sungai sehingga terjadi banjir di beberapa daerah lain dan penyebab lain dari penggunaan kantong plastik yaitu, dengan cepat maka kantong plastik dapat mencemari tanah, banyak hewan liar berakhir karena memakan kantong plastik. Penyumbatan akibat kantong plastik dapat berkembang biaknya nyamuk yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit kepada manusia, kantong plastik yang tertimbun tanah akan menghasilkan kualitas air bersih menurun jika kantong plastik dibakar menyebabkan atmosfer terkontaminasi sehingga menimbulkan polusi udara.

Saat ini Kota Banjarmasin volume sampah yang diproduksi perharinya mencapai 2.100 ton atau 766 ribu ton setahun. Dari jumlah itu 14%-nya adalah sampah plastik yang diperkirakan sebesar 295,6 ton perhari atau 107 ribu ton setahun. Jumlah sampah ini dipastikan akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk.

Data pengelolaan sampah yang disampaikan kabupaten/kota Banjarmasin untuk 2019 antara lain jumlah penanganannya baru 68,89% dan pengurangan sampah 19,66%. Kurang lebih dari 30% produksi sampah belum tertangani.

Pemerintah telah menghimbau untuk memilih sampah-sampah kategori tertangani, tapi sebenarnya belum dikelola dengan baik, dipilah dan sebagainya karena sebagian besar langsung dibuang ke TPA. Karena masyarakat tidak mau dibikin repot dengan membedakan mana sampah organik, an organik, dan berbahaya.

Apalagi sampah yang tidak tertangani umumnya menumpuk dibuang ke sembarang tempat, ke sungai dan lainnya. Sungai menjadi tempat pembuangan sampah raksasa yang menyebabkan banyak sungai yang mendangkal. Diakibatkan kebiasaan buruk masyarakat di Kota Banjarmasin membuang sampah sembarang terlebih di peruntukkan kepada yang bertempat tinggal di pinggir sungai.

Sebagai salah satu instansi publik, Kelurahan Telawang Kota Banjarmasin dituntut untuk bisa memberikan himbauan agar masyarakat lebih bisa memahami kebijakan yang dibuat sesuai dengan harapan semua untuk menjadi lingkungan bebas kantung plastik. Dalam menjalankan implementasi kebijakan dapat diukur menggunakan lima indikator kebijakan yaitu, Efektivitas dan Efisiensi, Kecukupan, Peralatan, Responsivitas, Ketetapan.

Dari uraian diatas dapat dilihat fenomena tersebut dimana masih banyaknya masyarakat di kota Banjarmasin yang membuang sampah sembarangan, dalam hal ini masyarakat sengaja menutup mata dan tidak patuh akan peraturan yang dibuat oleh pemerintah kota Banjarmasin. Maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang : Implementasi Kebijakan Perwali No 18 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Banjarmasin Kelurahan Telawang.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanai implementasi kebijakan peraturan walikota no. 18 tahun 2016

tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di kota Banjarmasin khususnya di kelurahan Telawang ?

2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota No. 18 Tahun 2016 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di kota Banjarmasin kelurahan telawang ?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Definisi Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam menjalankan rencana, kepemimpinan, dan cara pelaksanaan. Istilah ini bisa dilaksanakan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok disektor swasta, serta individu. Dengan ilmu-ilmu sosial, kebijakan diartikan sebagai dasar-dasar haluan untuk menentukan langkah-langkah atau tindakan-tindakan dalam mencapai suatu tujuan.

Pada dasarnya kebijakan (policy) yang diambil pemerintah mencerminkan keputusan mengenai apa yang akan dilakukan dan atau tidak dilakukan berkenaan dengan kepentingan umum (public interest). Wujud konkrit dari kebijakan adalah keluaran berupa program yang bersifat lebih operasional. Kebijakan merupakan suatu usaha pengambilan keputusan yang pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mendapat informasi, mengolahnya dan akhirnya membuat keputusan yang dianggap terbaik melalui program-program yang ditawarkan. Sedangkan James E. Anderson seperti yang dikutip oleh Islamy (1992: 19) menyatakan bahwa kebijakan pemerintah atau kebijakan adalah kebijakan yang dilambangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah. Dan implikasi-implikasi dari pengertian tersebut di atas adalah:

1. Bahwa kebijakan itu memiliki tujuan tertentu yang merupakan tindakan-

tindakan yang berorientasi pada tujuan.

2. Bahwa kebijakan itu berisikan yang dijalankan atau tindakan pejabat pemerintah.
3. Bahwa kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah suatu masalah tertentu bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
4. Bahwa kebijakan setidaknya dalam arti yang positif didasarkan selalu dilandaskan padaperaturan-peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa.

Kebijakan sebagai studi haruslah diartikan sebagai pernyataan kehendak yang diikuti oleh unsur pengaturan dan atau paksaan, sehingga dalam pelaksanaannya akan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Kebijakan publik menentukan bentuk suatu kehidupan setiap bangsa dan negara.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan istilah bahasa Inggris, yaitu *public policy*. Kata *policy* ada yang menerjemahkan menjadi “kebijakan” (Samodra Wibawa, 1994; Muhadjir Darwin, 1998) dan ada juga yang menerjemahkan menjadi “kebijaksanaan” (Islamy, 2001; Abdul Wahab, 1990) Meskipun belum ada kesepakatan bahwa *policy* diterjemahkan menjadi “kebijakan” atau “kebijaksanaan”, kecenderungan untuk *policy* digunakan istilah kebijakan. Oleh karena itu, *public policy* diterjemahkan menjadi kebijakan publik.

Menurut Thomas R. Dye (1992), “*public policy is whatever the government choose to do or not to do*” (kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan

sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan “tindakan” pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik ada tujuannya.

Berdasarkan beberapa pandangan para ahli tersebut, pada hakikatnya kebijakan publik dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik, baik untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik ditunjukkan untuk kepentingan masyarakat.

Menurut Van Meter dan Horn dalam Budi Winarno (2016 :135) mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan merupakan semua tindakan yang dilakukan oleh individu - individu/pejabat - pejabat atau kelompok - kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan - tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan sebelumnya. Tindakan - tindakan ini mencakup usaha - usaha untuk mengubah keputusan - keputusan menjadi tindakan - tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha - usaha untuk mencapai perubahan - perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan - keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan disini adalah bahwa tahap kebijakan akan dimulai sebelum tujuan - tujuan dan saran - saran ditetapkan dan dana disediakan untuk implementasi kebijakan tersebut

Hasbullah (2015 :94) memaparkan secara sederhana tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru ini bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program telah dirancang dan juga

telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan merupakan seluruh tindakan yang dilakukan untuk merealisasikan tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan mentransformasikan sebuah kebijakan ke dalam istilah operasional agar mudah dipahami oleh pelaksana kebijakan dan objek kebijakan.

3. Faktor Penghambat Dan Pendukung implementasi Kebijakan Menurut teori George C. Edward III.

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Dengan kata lain, tujuan, sasaran, dan berbagai informasi yang berkaitan dengan kebijakan harus ditransmisikan dengan baik dan benar untuk menjamin keberhasilan suatu kebijakan.

Terhadap tiga hal yang dilihat dari aspek komunikasi, yaitu sosialisasi, pemahaman terhadap kebijakan pengelolaan sampah, dan pembinaan.

b. Sumber Daya

“Sumber daya dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan merupakan salah satu faktor yang penting. Sumberdaya dalam sebuah program/kebijakan tidak hanya sumber daya manusia saja, melainkan sarana dan prasarana juga merupakan faktor yang mendukung keberhasilan suatu program. Ada 2 aspek penting dalam sumber daya

dalam penelitian ini yaitu aparat, dan fasilitas yang dimiliki aparat pelaksana.”

c. Disposisi

Disposisi adalah faktor ketiga yang mempengaruhi suatu kebijakan selain komunikasi dan sumberdaya. Disposisi yaitu bagaimana komitmen dan respon pelaksana kebijakan dalam menjalankan peraturan. Apabila aparat pelaksana memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya jika sikap dan perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga akan menjadi tidak efektif. Komitmen yang baik diharapkan menjadi efek yang baik pula dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Namun komitmen yang kurang baik akan memperlambat atau juga bahkan memperburuk suatu keadaan.

d. Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward III, walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat Standart Operating Procedure (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan yang sudah sangat maju dan berkembang, selain itu lokasi Kelurahan Telawang yang sangat strategis

4. Dimensi Implementasi kebijakan

William N. Dunn (2003:430) menyebutkan beberapa variabel-variabel yang dapat dijadikan alat untuk melihat efektivitas kebijakan dengan menggabungkan macam-macam model tersebut, yaitu:

a. Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi sangatlah berhubungan. Apabila kita membicarakan masalah efisiensi bilamana kita membayangkan hal pemakaian sumber daya (resources) kita secara optimal untuk suatu yang ingin dicapai.

Apabila sasaran yang ingin dituju suatu kebijakan publik ternyata sangat mudah dilakukan sedangkan biaya yang digunakan melalui tahapan kebijakan terlampaui tinggi dibandingkan dengan hasil yang memuaskan. Dalam hal ini kegiatan yang dilakukan dalam menjalankan kebijakan telah melakukan pengeluaran berlebihan dan tidak pantas untuk dikerjakan.

b. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat diartikan dengan tujuan yang telah diinginkan sudah mencukupi dalam berbagai aspek. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (adequacy) berkenaan dengan berkembang jauh suatu tingkatan efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau peluang yang menumbuhkan adanya problema.

c. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata.

d. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat dijelaskan dari suatu aktivitas.. Menurut Dunn menyatakan bahwa responsivitas dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan melalui anggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah dahulu memprediksi akibat yang akan jadi

jika kebijakan akan dilaksanakan, juga persepsi masyarakat setelah kebijakan mulai dapat dirasakan dalam hal yang positif berupa support ataupun bentuk yang negatif berupa tolakan.

Dunn (2003:437) mengatakan bahwa kriteria responsivitas ialah analisis yang dapat menstabilkan semua kriteria lainnya berupa (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal dalam menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok diuntungkan dengan adanya suatu kebijakan. Oleh sebab itu, kriteria responsivitas cerminan nyata keperluan, preferensi, dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

e. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Dikatakan kualitatif karena data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa kata-kata tertulis atau lisan. Penggunaan jenis penelitian ini dipandang lebih mendukung dalam memberikan arti dan makna yang berguna dalam menyerap permasalahan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengerti fenomena apa yang dialami oleh subyek penelitian, perilaku, persepsi, motivasi, perbuatan secara holistik dan dengan cara penyampaian deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Penelitian ini sebagai bahan informasi dalam fakta maupun kejadian secara sistematis dan cukup akurat dalam mengenai sifat-sifat informasi dalam menganalisis

kebenaran berdasarkan yang di dapat tentang implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Banjarmasin Kelurahan Telawang yang beralamat di Jl. Teluk Tiram Darat No. 81 Rt.07 Rw.01 Banjarmasin

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

wawancara adalah merupakan intraksi dua orang untuk bertukar informasi dan ide yang dimiliki melalui Tanya-jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dan dari wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data diperoleh secara langsung antara si pewawancara dengan narasumber mengenai implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental. Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa gambar atau foto-foto, serta data lain yang terkait dengan implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan perwali no.18 tahun 2016 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik dapat diukur dari indikator beberapa yaitu : Komunikasi, Sumber Daya, Desposisi, Struktur Birokrasi, Selain itu penulis juga meneliti faktor penghambat dan

pendukung dalam menjalankan kebijakan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan, perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan harapan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui implementasi kebijakan Pada Kelurahan Telawang Kota Banjarmasin. Komunikasi bertujuan untuk meningkatkan koordinasi berbagai informasi, dengan demikian komunikasi dapat mendukung pencapaian hasil yang diinginkan organisasi apabila komunikasi berjalan secara efisien dan efektif. Dalam melaksanakan sosialisasi terdapat penghambat seperti dari penyampaian kemasyarakatnya kurang memahami isi yang disampaikan maka dari itu pihak aparaturnya harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat sekitar. Dalam penyampaian informasi kepada masyarakat supaya tercapainya target dari pemerintah dalam menjalankan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik.

2. Sumber Daya

Sumber daya dapat ditempatkan sebagai input dalam organisasi dalam suatu sistem yang memiliki implikasi yang bersifat teknologis dan ekonomis. Secara ekonomis, sumber daya dengan biaya langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasi ke dalam output. Dapat menggunakan sarana dan prasarana secara optimal dalam melaksanakan himbauan dengan cara yang mudah dipahami masyarakat umum. Dalam melaksanakan implementasi kebijakan diperlukan juga dari masing-masing aparaturnya

mempunyai kemampuan pelaksanaan yang baik di lapangan supaya masyarakat menjalankan kebijakan dengan baik dan lancar.. Diharuskan setiap pegawai kelurahan bisa mengoprasikan segala sumber daya yang ada dengan baik. Menggunakan barang pengganti selain kantong plastik seperti bakul ataupun bahan yang mudah di daur ulang kembali.

3. Desposisi/Pelaksana

Konsekuensi bagi implementator kebijakan yang efektif". Jika para pelaksana mempunyai kebiasaan bersikap positif atau adanya dukungan untuk implementasi kebijakan maka terdapat suatu hal yang besar implementasi kebijakan yang terlaksana sesuai keputusan awal. Melalui pemahaman dan pendalaman, arah respon kebijakan, intensitas kebijakan, jika pelaksanaan ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. penyampaian informasi kebijakan diterima positif dari warga karena dengan cara bahasa yang benar, sopan dan santun maka dapat dipahami dengan baik. pelaksanaan sendiri harus mengikuti prosedur yang telah di berikan kepada kelurahan telawang sesuai dengan standar operasional prosedur(SOP).

4. Sturuktur Birokrasi

Sumber - sumber untuk menjalankan suatu kebijakan harus tersedia dari para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dikerjakan dan mempunyai hasrat untuk melaksanakan suatu kebijakan publik, berkemungkinan kebijakan itu tidak dapat terlaksana karena adanya kelemahan dalam di struktur birokrasi. Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan kebijakan dan program kerjanya dan mempertanggungjawabkan secara internal kepada masing-masing pegawai. Standar operasional prosedur

merupakan standarnya langkah kerja bagi aparaturnya dalam menyelesaikan pekerjaan yang sudah menjadi tugasnya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bagaimana penerapan Peraturan Walikota Banjarmasin No. 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik serta apa saja yang menjadi hambatan dan pendukung dalam penerapan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kelurahan Telawang.

Dalam penerapan kebijakan perwali tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di kota Banjarmasin Kelurahan Telawang masih perlu perbaikan dalam faktor pendukung implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik. Belum efektifnya penerapan kebijakan tersebut disebabkan oleh masih banyaknya hambatan dalam proses penerapan kebijakan tersebut. Masih banyak faktor penghambat dalam penerapan tersebut berbanding terbalik dengan faktor yang mendukung kebijakan tersebut minim sekali faktor yang mendukung agar kebijakan tersebut berjalan sebagaimana berdasarkan tujuan awal dari kebijakan tersebut.

Ada beberapa faktor penghambat dalam penerapan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik diantaranya:

Kurangnya alat alternatif pengganti kantong plastik sebagai contoh yang harus digunakan masyarakat dalam berbelanja,

Banyaknya warga kelurahan telawang yang tidak memedulikan kebijakan tersebut,

Minimnya informasi yang disampaikan dalam mengadakan sosialisasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik agar diterima dengan mengerti.

Sedangkan dari beberapa faktor pendukung dalam penerapan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik seperti, Disposisi dalam berkomitmen dan

respon dari pegawai/staff kelurahan telawang yang cukup baik agar tercapainya tujuan kebijakan, dan terdapat faktor pendukung yaitu struktur birokrasi kelurahan telawang yang sesuai dengan ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP) agar kebijakan tersebut berjalan dengan lancar. Memberikan saran dalam penggunaan kantong plastik secara bijaksana dan lebih memanfaatkan bahan selain kantong plastik dalam membawa barang belanja. Menjadikan bahan alternatif lain sebagai alat membawa barang belanja yang lain seperti bakul, kantong terbuat dari kain dan lain-lain.

SARAN

1. Dari pihak kelurahan lebih berupaya lagi dalam mensosialisasikan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik secara berkelanjutan, sosialisasi dilakukan dalam bentuk gambar atau pun tulisan yang menarik.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat khusus di kelurahan telawang bahwa bahayanya dalam penggunaan kantong plastik secara berlebih dan memberikan gambaran dampak yang akan terjadi.
3. Mencegah hambatan yang sering terjadi dalam melaksanakan implementasi agar semakin berkembang dan semakin terarah dalam penerapan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Hasbullah. 2015. *Kebijakan Pendidikan dalam perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*,
Malang : Bayu Media

Anggara, Sahya 2014, *Kebijakan Publik*,
Bandung : Pustaka Setia

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian
Kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung:
Alfabeta

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian
Kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung:
Alfabeta

Undang- Undang No. 18 Tahun 2008

Peraturan Walikota No. 18 Tahun 2016

Lusnita, N. (2019) *“Program Pengurangan
Sampah Plastik Melalui
Kebijakan Kantong Plastik
Berbayar Di Ritel Modern*

Handityasa, O., Purnawen, H. (2017)
*”Taktor Pendukung Dan
Penghambat Implementasi
Peraturan Izin Usaha Toko
Modern Minimarket
Waralaba/Cabang Kecamatan*

*Depok Terkait Perda Kab.
Sleman No.18 Tahun 2012
Tentang Perizinan Pusat
Berbelanja Dan Toko Modern*

Nasrun., Kurniawan, E., Sari, I. (2015).
*“Pengelolaan Limbah Kantong
Plastik Jenis Kresek Menjadi
Bahan Bakar Menggunakan
Proses Pirolisis. Jurnal Energi
Elektrik*

[http://jejakrekam.com/2019/09/04/membedah
-instrumen-hukum-sampah-plastik-perwali-
banjarmasin/](http://jejakrekam.com/2019/09/04/membedah-instrumen-hukum-sampah-plastik-perwali-banjarmasin/)

[https://mediaindonesia.com/read/detail/51965
-pemkot-banjarmasin-larang-penggunaan-
kantong-plastikk](https://mediaindonesia.com/read/detail/51965-pemkot-banjarmasin-larang-penggunaan-kantong-plastikk)

[https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/11/
13/saatnya-peduli-sampah-plastik](https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/11/13/saatnya-peduli-sampah-plastik)